RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2020

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MADIUN

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karena-Nya, sehingga "Rencana Kerja" (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Tahun 2020 dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun adalah Tahun 2020 merupakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Tahun 2019-2024. Penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui proses koordinasi antar instansi pemerintah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta merupakan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Madiun yang merupakan hasil reses masa persidangan tahun 2018 dan top down serta pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

Renja sebagai dokumen resmi pelaksanaan program dan kegiatan, yang selanjutnya akan dijadikan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja di Tahun 2020. RKPD yang dilanjutkan dengan RENJA mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjebatani antara perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Madiun, 10 Mei 2019

KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MADIUN

SUNARDI NURCAHYONO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770518 199511 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penyusunan Renja 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA. 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 16

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 17

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra 18

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 24

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 25

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 26

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja..... 28

3.3 Program dan Kegiatan 27

BAB IV PENUTUP 38

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MADIUN
NOMOR : 050/15/401.116/2019

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MADIUN
TAHUN 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MADIUN,

Menimbang :

a. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun untuk Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4598);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Miminal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor2l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyetaraaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705) ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
38. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
40. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016) ;
41. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MADIUN TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris, Kepala Bidang, Sub Bagian/Kepala Seksi agar menjadikan Rencana Kerja ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.

KETIGA : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : M A D I U N
pada tanggal : 02 Januari 2019

KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MADIUN

SUNARDI NURCAHYONO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770518 199511 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun terakhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Tahun 2019-2024, sebagaimana rancangan awal RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui proses koordinasi antar instansi pemerintah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Restra) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani singkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebiajakan uum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh palaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan Renja juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk

sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Madiun.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD yang dilanjutkan dengan RENJA mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan. Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undnag-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

i. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2005 – 2025;
j. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
k. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014-2019;
l. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
m. Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
n. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun ini disusun dengan maksud mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pelaksanaan program kegiatan.

2. Tujuan

a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2020;
b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2020;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan

2.2 Isi-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Tahun 2019–2024 mempunyai Visi "Terwujudnya Kota Madiun Aman, Tertib, Tentram". Sedangkan misi yang akan dicapai adalah :

1. Mewujudkan Stabilitas Daerah yang kondusif melalui penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Meningkatkan Fungsi Penanggulangan Kebakaran dan Peran Serta Perlindungan Masyarakat.

Sesuai visi dan misi tersebut, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun pada Tahun 2017 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kota Madiun. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2018 adalah :

1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
   Kegiatan : Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   Penyelesaian : 75,88 %
   Anggaran : Rp. 2.381.233.000,-
   Realisasi : Rp. 1.806.918.486,-
2. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
   Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
   Penyelesaian : 100 %
   Anggaran : Rp. 190.000.000,-
   Realisasi : Rp. 190.000.000,-
3. Program : Pemeliharaan Barang Milik Daerah
   Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan
   Penyelesaian : 0 %
   Anggaran : Rp. 75.000.000,-
   Realisasi : Rp. 75.000.000,-
4. Program : Pemeliharaan Barang Milik Daerah
   Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
   Penyelesaian : 63,90 %

	Anggaran	:	Rp. 503.872.000,-
	Realisasi	:	Rp. 321.987.650,-
5.	Program	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
	Kegiatan	:	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor
	Penyelesaian	:	98,68 %
	Anggaran	:	Rp. 20.000.000,-
	Realisasi	:	Rp. 19.735.500,-
6.	Program	:	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Kegiatan	:	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
	Penyelesaian	:	68,77 %
	Anggaran	:	Rp. 174.000.000,-
	Realisasi	:	Rp. 119.660.000,-
7.	Program	:	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Kegiatan	:	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
	Penyelesaian	:	96,48 %
	Anggaran	:	Rp. 198.600.000,-
	Realisasi	:	Rp. 191.613.000,-
8.	Program	:	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Kegiatan	:	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Penyelesaian	:	42,93 %
	Anggaran	:	Rp. 88.442.160,-
	Realisasi	:	Rp. 37.969.972,-
9.	Program	:	Pemberdayaan Satpol PP Dalam Pelaksanaan Tugas
	Kegiatan	:	Bimtek Anggota Satpol PP
	Penyelesaian	:	97,63 %
	Anggaran	:	Rp.193.246.120,-
	Realisasi	:	Rp. 188.670.876,-
10.	Program	:	Pemberdayaan Satpol PP Dalam Pelaksanaan Tugas
	Kegiatan	:	Peringatan HUT Satpol PP se Jawa Timur
	Penyelesaian	:	84,26 %
	Anggaran	:	Rp. 203.296.400,-
	Realisasi	:	Rp. 171.298.820,-
11.	Program	:	Pemberdayaan Satpol PP Dalam Pelaksanaan Tugas
	Kegiatan	:	Jambore Satpol PP se Jawa Timur
	Penyelesaian	:	44,38 %

	Anggaran	:	Rp. 82.902.560,-
	Realisasi	:	Rp. 36.791.223,-
12.	Program	:	Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	Kegiatan	:	Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	Penyelesaian	:	67,33 %
	Anggaran	:	Rp. 283.127.760,-
	Realisasi	:	Rp. 190.644.046,-
13.	Program	:	Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	Kegiatan	:	Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	Penyelesaian	:	49,83 %
	Anggaran	:	Rp. 68.224.560,-
	Realisasi	:	Rp. 33.995.000,-
14.	Program	:	Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	Kegiatan	:	Koordinasi dan Evaluasi Penyelengaaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	Penyelesaian	:	68,82 %
	Anggaran	:	Rp. 150.037.560,-
	Realisasi	:	Rp. 103.256.375,-
15.	Program	:	Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	Kegiatan	:	Patroli Wilayah Satpol PP
	Penyelesaian	:	58,28 %
	Anggaran	:	Rp. 333.740.000,-
	Realisasi	:	Rp. 194.515.234,-
16.	Program	:	Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	Kegiatan	:	Pembinaan Pengendalian Pengamanan Giat Pemerintah
	Penyelesaian	:	69,20 %
	Anggaran	:	Rp. 199.495.920,-
	Realisasi	:	Rp. 138.058.345,-

17.	Program	:	Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
	Kegiatan	:	Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
	Penyelesaian	:	50,58 %
	Anggaran	:	Rp. 160.828.560,-
	Realisasi	:	Rp. 81.342.621,-
18.	Program	:	Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
	Kegiatan	:	Pembinaan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
	Penyelesaian	:	85,82 %
	Anggaran	:	Rp. 112.036.560,-
	Realisasi	:	Rp. 96.152.984,-
19.	Program	:	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
	Kegiatan	:	Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran
	Penyelesaian	:	66,66 %
	Anggaran	:	Rp. 205.644.400,-
	Realisasi	:	Rp. 137.074.136,-
20.	Program	:	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
	Kegiatan	:	Inspeksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Instansi Pemerintah dan Swasta
	Penyelesaian	:	59,39 %
	Anggaran	:	Rp. 99.358.620,-
	Realisasi	:	Rp. 59.009.500,-
21.	Program	:	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
	Kegiatan	:	Operasi Pemadam Kebakaran
	Penyelesaian	:	80,33 %
	Anggaran	:	Rp. 120.176.400,-
	Realisasi	:	Rp. 96.533.717,-
22.	Program	:	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

	Kegiatan	:	Penyuluhan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
	Penyelesaian	:	93,53 %
	Anggaran	:	Rp. 97.999.520,-
	Realisasi	:	Rp. 91.661.279,-
23.	Program	:	Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
	Kegiatan	:	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
	Penyelesaian	:	71,93 %
	Anggaran	:	Rp. 105.651.400,-
	Realisasi	:	Rp. 75.993.990,-
24.	Program	:	Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
	Kegiatan	:	Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
	Penyelesaian	:	0 %
	Anggaran	:	Rp. 503.431.120,-
	Realisasi	:	Rp. 0,-
25.	Program	:	Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
	Kegiatan	:	Peningkatan Peran dan Partisipasi Satlinmas Dalam Memperingati Hari-hari Besar Nasional dan Lainnya
	Penyelesaian	:	73,67 %
	Anggaran	:	Rp. 52.526.400,-
	Realisasi	:	Rp. 38.695.231,-
26.	Program	:	Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
	Kegiatan	:	Sosialisasi Ketentraman dan Ketertiban umum Persiapan Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres
	Penyelesaian	:	54,09 %
	Anggaran	:	Rp. 126.036.960,-
	Realisasi	:	Rp. 68.170.048,-
27.	Program	:	Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
	Kegiatan	:	Pengamanan Pilkada, Pileg, dan Pilpres di Kelurahan dan Kecamatan se Kota Madiun
	Penyelesaian	:	95,18%
	Anggaran	:	Rp. 474.950.800,-
	Realisasi	:	Rp. 452.064.974,-

28. Program : Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan : Pelepasan dan Penurunan Alat Peraga Peserta Pilkada, Pileg, dan Pilpres
Penyelesaian : 28,12%
Anggaran : Rp. 48.567.400,-
Realisasi : Rp. 13.660.000,-

Nilai rata-rata pelaksanaan kegiatan di tahun 2018 berdasarkan realisasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun di tahun 2018 sebesar 68,33 %, dengan demikian realisasi tersebut masih kurang dari target sebesar 100 %.

Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan tahun anggaran 2018 guna mengetahui penyebab tidak terpenuhi target kinerja tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun tidak dapat menyerap habis anggaran yang ada karena adanya asas kemanfaatan, sehingga dana yang ada digunakan dengan efektif dan efisien sesuai penggunaan.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun pada tahun 2018 dengan realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Adapun realisasi dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran strategis, program, anggaran, realisasi dan prosentase
Tahun anggaran 2018

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Meningkatnya penegakan hukum menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih aspiratif dan berwibawa	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 2.571.233.000	Rp. 1.891.713.086	73,57
		2. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rp. 598.872.000	Rp. 325.984.324	54,43
		3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 372.600.000	Rp. 311.273.000	83,54
		4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 88.442.160	Rp. 37.969.972	42.93

		5. Program Pemberdayaan Satuan polisi pamong praja dalam Pelaksanaan Tugas	Rp. 479.445.080	Rp. 376.360.919	78,50
		6. Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Rp. 272.865.120	Rp. 158.482.605	58,08
		7. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Rp. 1.034.325.100	Rp. 521.803.342	50.43
2.	Meningkatkan kesiagaan Pengendalian Bahaya Kebakaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta Perlindungan Masyarakat	1. Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Rp. 1.311.173.080	Rp. 615.851.243	46.96
		2. Program peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp. 523.178.940	Rp. 384.278.632	73,45
Jumlah Total			Rp.7.252.435.180	Rp. 4.623.717.123	63,75

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Tahun 2018 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Tahun 2018 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Tahun 2020, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
b. Tujuan yang dikehendaki.
c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.
d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan serta seksi pelaksana.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Tahun 2020 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2018 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2020.
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Tabel 2.2
Pengukuran realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun tahun 2018 didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian kinerja sebagaimana pada tabel berikut :

No.	Sasaran	Indikator	Terget Kinerja	Realisasi Kinerja	Nilai Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya penegakan hukum menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih aspiratif dan berwibawa	1. Persentase masyarakat yang taat Perda dan Perwal	100%	98,83%	98,83%	98%
No.	Sasaran	Indikator	Terget Kinerja	Realisasi Kinerja	Nilai Kinerja	Capaian Kinerja
2.	Meningkatkan kesiagaan Pengendalian Bahaya Kebakaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta Perlindungan Masyarakat	1. Tingkat Waktu tanggap (response time rate) 2. Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kota	100% 1.3 orang setiap RT	100% 1.3 orang setiap RT	100% 100%	100% 100%

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel 2.3

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2018

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2018 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2017 (Tahun n)		SKPD Penanggung Jawab
										Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	
1					2	3	4	5	6	7	(8)=(7/6)	(9)=(5+7)	(10)=(9/4)	
1	05				URUSAN WAJIB DASAR									
1	05				Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
1	05	01	15		Program Pemberdayaan Satpol dalam pelaksanaan tugas	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6 org	2.8 org	4 org	4,6	1,15	5.4 org	0,9	
1	05	01	15	01	Kegiatan Bimtek Anggota Satpol PP	Jumlah peserta diklat/ bimtek yang ikut	39 org	40 org	46 org	40 org	0,87	84 org	2,15	
1	05	01	15	02	Kegiatan Peringatan HUT Satpol PP se Jawa Timur	Jumlah peserta HUT Satpol PP se Jawa Timur	72 org	6123 org	500 org	850 org	1,7	6.973 org	96,84	
1	05	01	15	03	Kegiatan Jambore Satpol PP se Jawa Timur	Jumlah Peserta Jambore Satpol PP	24 org	21 org	24 org	17 org	0,70	38 org	1,58	
1	05	01	16		Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Cakupan patroli petugas Satpol PP perhari	9 kali	6 kali	6 kali	6 kali	1	12 kali	1,3	
1	05	01	16	01	Kegiatan Penertiban Umum dan	Jumlah pelanggaran K3 yang	1471 pelanggar	1420 pelanggar	1420 pelanggar	4239 pelanggar	2,99	5659 pelanggar	3,85	

					Ketentraman Masyarakat	terselesaikan								
1	05	01	16	02	Kegiatan Pembinaan Tibum Trammas	Jumlah peserta pembinaan	390 pelanggar	743 pelanggar	450 pelanggar	421 pelanggar	1	1164 pelanggar	2,98	
1	05	01	16	03	Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah pelanggaran Perda di Daerah dan persamaan persepsi ke luar Daerah	150 orang	770 orang	390 orang	265 orang	0,68	1035 orang	6,9	
1	05	01	16	04	Kegiatan Patroli Wilayah Satpol PP	Jumlah patroli Satpol PP per tahun	9 kali	6 kali	6 kali	6 kali	1	12 kali	1,3	
1	05	01	16	05	Kegiatan Pengendalian Pengamanan Giat Pemerintah	Jumlah Pengamanan	120 kali	743 kali	120 kali	724 kali	6	1467 kali	12,22	
1	05	01	17		Program pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	100%	91,3%	100%	100%	1	191,3%	1,91	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	17	01	Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda dan Perwal	100%	91,3%	100%	100%	1	191,30%	1,913	
1	05	01	17	02	Kegiatan Pembinaan Operasi Penegakan Perda dan Perwal	Jumlah Peserta Pembinaan Operasi Penegakan Perda dan Perwal	150 orang	743 orang	150 orang	168 orang	1	911 orang	6,07	

1	05	01	18		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu tanggap (response time rate)	100%	100%	100%	100%	1	200%	2	
1	05	01	18	01	Kegiatan Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Peserta Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Kebakaran)	150 orang	200 orang	200 orang	200 orang	1	350 orang	2,33	
1	05	01	18	05	Kegiatan Inspeksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Instansi Pemerintah dan Swasta	Jumlah Peserta Kegiatan Inspeksi	249 orang	0	249 orang	249 orang	1	249 orang	1	
1	05	01	18	06	Kegiatan Operasi Pemadam Kebakaran	Jumlah Pemadam Kebakaran	48 lokasi	0	48 lokasi	84 lokasi	1,75	84 lokasi	1,75	
1	05	01	18	07	Kegiatan Penyuluhan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Peserta Penyuluhan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	300 orang	0	300 orang	300 orang	1	300 orang	1	
1	05	01	19		Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) di kota	1 org per RT	1 org Per RT	1 org per RT	1,3 org Per RT	1,3	2,3	2,3	
1	05	01	19	01	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah masyarakat yang diperdayakan dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	801 peserta	801 peserta	801 peserta	331 peserta	0,41	1132 peserta	1,41	

1	05	01	19	02	Kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Pos Kamling	830 pos kamling	849 pos kamling	825 pos kamling	1317 pos kamling	1,59 pos kamling	1756 pos kamling	2,11	
1	05	01	19	04	Kegiatan Peningkatan Peran dan Partisipasi Satlinmas Dalam Memperingati Hari-hari Besar Nasional dan Lainnya	Jumlah personil satlinmas yang ikut dalam upacara hari-hari besar nasional	868 orang	455 orang	192 orang	192 orang	1	647 orang	0,74	
1	05	01	19	05	Kegiatan Sosialisasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persiapan Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres	Jumlah Peserta Sosialisasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persiapan Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres	1200 orang	0	1200 orang	1300 orang	1,08	1300 oang	1,08	
1	05	01	19	06	Kegiatan Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres di Kelurahan dan Kecamatan se Kota Madiun	Jumlah Lokasi Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres di Kelurahan dan Kecamatan se Kota Madiun	30 lokasi	0	30 lokasi	30 lokasi	1	30 lokasi	1	

1	05	01	19	07	Kegiatan Pelepasan dan Penurunan Alat Peraga Peserta Pilkada, Pileg dan Pilpres	Jumlah Alat Peraga Peserta Pilkada, Pileg dan Pilpres	500 alat peraga	0	500 alat peraga	2.587 alat peraga	5,17	2.587 alat peraga	5,17	

Madiun, 10 Mei 2019

KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MADIUN

SUNARDI NURCAHYONO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770518 199511 1 001

Penjelasan 2.3 adalah sebagai berikut :

1. Program / Kegiatan Tahun 2018 telah mencapai target.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan

Sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan yaitu Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Pada tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan 9 program dan 28 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut :

1. Prosentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal.
2. Tingkat Waktu tanggap (response time rate)
3. Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kota

Analisis pencapaian pelayanan dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini :

No.	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi Kinerja Tahun 2018
1.	Prosentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	100%	97,95%
2.	Tingkat Waktu tanggap (response time rate)	75%	100%
3.	Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kota	1 orang setiap RT	1.3 orang setiap RT

Realisasi pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun di Tahun 2017 dengan indikator sasaran :

1. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota dengan realisasi sebesar 97,95%.
2. Tingkat Waktu tanggap (response time rate) sebesar 100%.
3. Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota dengan realisasi sebesar 1.3 orang setiap RT.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Perlindungan Masyarakat, serta penangulangan bencana kebakaran terdapat kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan dan kendala tersebut antara lain :

1. Meningkatnya persentase pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota Madiun.
2. Meningkatnya kasus kebakaran di WMK Kota Madiun.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra

Rancangan awal RKPD/Renstra menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2014-2019 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja, maka tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu misi Mewujudkan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Berdasarkan amanah Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terdapat perubahan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Satuan Polisi Pamong Praja membidangi urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sehingga mengalami perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dengan eselon II memiliki 1 sekretaris, 3 bidang dan 8 seksi serta jabatan fungsional umum.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/Renstra dapat dilihat pada Tabel 2.5

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA TAHUN 2019

No	Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
A.	Urusan : Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										
I.	Program pengawasan, penendalian dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Satpol PP	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	100%	343.787.000	Program pengawasan, penendalian dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Satpol PP	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	100%	343.787.000	
1.	Kegiatan Pembinaan Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Satpol PP	Jumlah Pelanggar Perda dan Perwal	150 pelanggar	200.000.000	Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Satpol PP	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perwal	123 pelanggar	200.000.000	
2.	Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Satpol PP	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perwal	100%	143.787.000	Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Satpol PP	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perwal	100%	143.787.000	

II	Program Pemberdayaan Satpol dalam Pelaksanaan Tugas	Satpol PP	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6	652.111.000	Program Pemberdayaan Satpol dalam Pelaksanaan Tugas	Satpol PP	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6	652.111.000	
1.	Kegiatan Bimtek Anggota Satpol PP	Satpol PP	Jumlah Peserta Diklat/Bimtek Yang diikuti	46 orang	209.249.000	Kegiatan Bimtek Anggota Satpol PP	Satpol PP	Jumlah Peserta Diklat/Bimtek Yang diikuti	46 orang	129.429.000	
2.	Kegiatan Peringatan HUT Satpol PP se Jawa Timur	Satpol PP	Jumlah Peserta HUT Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Timur	500 orang	366.487.000	Kegiatan Peringatan HUT Satpol PP se Jawa Timur	Satpol PP	Jumlah Pesera HUT Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Timur	500 orang	366.487.000	
3.	Kegiatan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Timur	Satpol PP	Jumlah Peserta Jambore Satpol PP	20 orang	76.195.000	Kegiatan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Timur	Satpol PP	Jumlah Peserta Jambore Satpol PP	20 orang	76.195.000	
III	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Satpol PP	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP	9 Kali	753.396.000	Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Satpol PP	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP	9 Kali	753.396.000	
1.	Kegiatan Patroli Wilayah Satpol PP	Satpol PP	Jumlah Patroli per Hari	9 kali	253.442.000	Kegiatan Patroli Wilayah Satpol PP	Satpol PP	Jumlah Patroli per Hari	9 kali	253.442.000	
2.	Kegiatan Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Satpol PP	Jumlah pelangaran K3 yang Terselesaikan	1420 pelanggar	192.147.000	Kegiatan Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Satpol PP	Jumlah pelangaran K3 yang Terselesaikan	1420 pelanggar	192.147.000	

4.	Kegiatan Koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Satpol PP	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Evaluasi	150 orang	150.000.000	Kegiatan Koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Satpol PP	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Evaluasi	150 orang	150.000.000	
5.	Kegiatan Pengendalian Pengamanan Giat Pemerintah	Satpol PP	Jumlah Giat Pemerintah Pengamanan	240 kali	157.807.000	Kegiatan Pengendalian Pengamanan Giat Pemerintah	Satpol PP	Jumlah Giat Pemerintah Pengamanan	240 kali	157.807.000	
IV	Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota	2 orang setiap RT	1.255.172.000	Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota	2 orang setiap RT	1.255.172.000	
1.	Kegiatan peningkatan Peran dan partisipasi Satlinmas dalam Hari-hari Besar Nasional dan lainya	Satpol PP	Jumlah personil Satlinmas yang ikut dalam upacara Hari-hari Besar Nasional	1300 orang	110.000.000	Kegiatan peningkatan Peran dan partisipasi Satlinmas dalam Hari-hari Besar Nasional dan lainya	Satpol PP	Jumlah personil Satlinmas yang ikut dalam upacara Hari-hari Besar Nasional	1300 orang	110.000.000	
2.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Satpol PP	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan Dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	801 peserta	98.395.000	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Satpol PP	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan Dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	801 peserta	98.395.000	
3.	Kegiatan	Satpol PP	Jumlah Pos	865	365.020.000	Kegaiatan	Satpol PP	Jumlah Pos	865	365.020.000	

	Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Kamling	Pos kamling		Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Kamling	Pos kamling		
4.	Kegiatan Sosialisasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persiapan Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres	Satpol PP	Jumlah peserta sosialisasi Ketentraman dan ketertiban umum persiapan pengamanan Pilkad, pileg dan Pilpres	621 orang	180.000.000	Kegiatan Sosialisasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persiapan Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres	Satpol PP	Jumlah peserta sosialisasi Ketentraman dan ketertiban umum persiapan pengamanan Pilkad, pileg dan Pilpres	621 orang	180.000.000	
5.	Kegiatan Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres di Kelurahan dan Kecamatan se Kota Madiun	Satpol PP	Jumlah TPS Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres di kelurahan dan kecamatan se Kota Madiun	30 lokasi	460.437.000	Kegiatan Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres di Kelurahan dan Kecamatan se Kota Madiun	Satpol PP	Jumlah TPS Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres di kelurahan dan kecamatan se Kota Madiun	30 lokasi	460.437.000	
6.	Kegiatan Pelepasan dan Penurunan Alat Peraga peserta Pilkada, Pileg dan Pilpres	Satpol PP	Alat peraga peserta pilkada, pileg dan pilpres	150 alat peraga	41.320.000	Kegiatan Pelepasan dan Penurunan Alat Peraga peserta Pilkada, Pileg dan Pilpres	Satpol PP	Alat peraga peserta pilkada, pileg dan pilpres	150 alat peraga	41.320.000	
V	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Satpol PP	Persentase peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan Bahaya Kebakaran	100%	489.122.000	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Satpol PP	Persentase peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan Bahaya Kebakaran	100%	489.122.000	

1.	Kegiatan Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran	Satpol PP	Jumlah peserta pembekalan dan pelatihan penanggulangan bencana (Kebakaran)	150 orang	208.000.000	Kegiatan Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran	Satpol PP	Jumlah peserta pembekalan dan pelatihan penanggulangan bencana (Kebakaran)	150 orang	208.000.000	
2.	Kegiatan Inspeksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Instansi Pemerintah dan Swasta	Satpol PP	Jumlah Instansi Pemerintah dan Swasta	48 lokasi	91.859.000	Kegiatan Inspeksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Instansi Pemerintah dan Swasta	Satpol PP	Jumlah Instansi Pemerintah dan Swasta	48 lokasi	91.859.000	
3.	Kegiatan Operasi Pemadam Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Kejadian Kebakaran	48 kali	112.920.000	Kegiatan Operasi Pemadam Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Kejadian Kebakaran	48 kali	112.920.000	
4.	Kegiatan Penyuluhan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam	Satpol PP	Jumlah peserta penyuluhan tentang pencegahan dan penanggulangan bencana	300 orang	85.955.000	Kegiatan Penyuluhan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam	Satpol PP	Jumlah peserta penyuluhan tentang pencegahan dan penanggulangan bencana	300 orang	85.955.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dididkusikan dalam pembahasan forum OPD Kota Madiun. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakan hasil musrenbang RKPD Kota Madiun di Kecamatan. Pada forum OPD belum ada urusan program/kegiatan yang ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, stakeholder dan OPD Kota Madiun.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Karena pemilu Presiden baru akan dilaksanakan ditahun 2019 maka untuk arah kebijakan nasional di tahun 2020 belum bisa dirumuskan. Untuk itu acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan visi misi Kepala Daerah Terpilih sebagai berikut :

1. Visi :

   Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera
2. Misi 5 :

   Mewujudkan kemandirian Ekonomi dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat
3. Tujuan 2 :

   Mewujudkan stabilitas kehidupan masyarakat yang dinamis dan kondusif
4. Indikator Tujuan :

   Indeks Ketentraman
5. Sasaran 2 :

   Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
6. Indikator Sasaran :

   Indeks Rasa Aman

1.2 Tujuan dan Sasaran Renja

1.2.1 Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun

Tujuan ini untuk menetapkan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Tahun 2020 adalah :

1. Menjabarkan Rancangan awal RPJMD Kota Madiun, dalam rencana Program kegiatan Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Tahun Anggaran 2020.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020.
3. Menjadikan acuan bagi di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik.

4. Menciptakan kepastian dan sinegritas perencanaan program dan kegiatan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.
5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran yang ada dalam Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Tujuan dari pada program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja untuk tahun 2020 sebagai berikut :
    1. Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui Penegakan Perda dan Perwal.

1.2.2 Sasaran Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun

Sasaran yang digunakan dalam rangka penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun tahun 2020 diantaranya :

1. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat berjalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam renstra.
2. Merumuskan indikator sasaran program kegiatan yang akan direncanakan tahun 2020 yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.
3. Sasaran program kegiatan di tahun 2020 merupakan penjabaran dari Renstra 2019-2024, sasaran yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Tahun 2020 diantaranya :
    a. Meningkatnya penegakan hukum dalam rangka penyelengaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Peraturan Walikota serta peraturan Perundang-undangan Lainnya.
    b. Meningkatkan kesiagaan Pengendalian Bahaya Kebakaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta Perlindungan Masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

Program prioritas yang telah ditetapkan merupakan program yang memiliki manfaat untuk dalam jangka 1 (satu) tahun mendatang atau tahun 2020 yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sehingga mencapai sasaran yang bermanfaat langsung oleh masyarakat. Seiring dengan adanya amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerinatahan Daerah dan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah, maka terdapat perubahan urusan sehingga menyebakan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah termasuk pada Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga terdapat perubahan urusan yang mengakibatkan perubahan Program dan Kegiatan. Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2019 mencakup 9 program, dan 18 Kegiatan diantaranya :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

   Kegiatan :

   1) Kegiatan Penyedia Jasa, Peralatan dan Perlengakapan Kantor
   2) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

2. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah

   Kegiatan :

   1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan
   2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor
   3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

   Kegiatan :

   1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
   2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
   3) Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan (Rehab Gudang Satpol PP)

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

   Kegiatan :

   1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5. Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

   1) Kegiatan Pembinaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
   2) Kegiatan Operasi Penegakan Pertauran Daerah dan Peraturan Walikota

6. Program Pembinaan, Penertiban dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
   1) Kegiatan Peningkatan SDA dan Kerjasama Satpol PP dan Damkar
   2) Kegiatan Penertiban dan Evaluasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
   3) Kegiatan Pengamanan Kegiatan Pemerintah
7. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

   Kegiatan :
   1) Kegiatan Pemberdayaan dan Evaluasi Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
   2) Kegiatan Pengerahan dan Pengendalian Satuan Linmas
8. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
   1) Kegiatan Pencegahan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran
   2) Kegiatan Operasi dan evaluasi Penanggulangan Pemadam Kebakaran

Rumusan rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2020 dan prakiraan maju tahun 2020 untuk sumber dana APBD Kota Madiun secara detail dapat dilihat pada lampiran Tabel 4.1 berikut ini :

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	05	10501	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Terlaksanakannya Administrasi Perkantoran	Satpol PP	100%	2.806.012.000	APBD Kota : 2.806.012.000		100%	3.061.615.000	Satpol PP
1	05	10501	01	01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Barang Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	7 jenis	2.556.012.000	APBD Kota : 2.556.012.000		7 jenis	2.811.615.000	
1	05	10501	01	02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Satpol PP	30 kali	250.000.000	APBD Kota : 200.000.000		30 kali	250.000.000	
1	05	10501	02		Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Prosentase Barang Inventarisasi Dalam Kondisi Baik	Satpol PP	100%	550.000.000	APBD Kota : 550.000.000		100%	550.000.000	
1	05	10501	02	01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Gedung Yang Dipelihara	Satpol PP	1 gedung	25.000.000	APBD Kota : 25.000.000		1 gedung	30.000.000	

1					2	3	4	4	6	7	8	9	10	11
1	05	10501	02	02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jenis Sarana dan Prasarana Kantor	Satpol PP	6 Jenis	25.000.000	APBD Kota : 25.000.000		6 Jenis	30.000.000	
1	05	10501	02	03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas Yang dipelihara	Satpol PP	33 unit	500.000.000	APBD Kota : 500.000.000		33 unit	500.000.000	
1	05	10501	03		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Satpol PP	100%	783.000.000	APBD Kota : 783.000.000		100%	400.000.000	
1	05	10501	03	01	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang dibeli	Satpol PP	10 jenis	196.000.000	APBD Kota : 196.000.000		0	0	
1	05	10501	03	02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Satpol PP	114 orang	400.000.000	APBD Kota : 400.000.000		114 orang	400.000.000	
1	05	10501	03	03	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan (Rehab Gudang Satpol PP)	Gudang Kantor yang direhab	Satpol PP	1 gedung	187.000.000	APBD Kota : 187.000.000		0	0	
1	05	10501	05		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu	Satpol PP	100%	99.850.000	APBD Kota : 99.850.000		100%	99.850.000	

1					2	3	4	4	6	7	8	9	10	11
1	05	10501	05	04	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan/ pelaporan	Satpol PP	12 dokumen	99.850.000	APBD Kota : 99.850.000		12 dokumen	99.850.000	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1	5				KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	05	10501	16		Program Pembinaan Penertiban Umum dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP per hari	Satpol PP	9 kali	2.092.757.000	APBD Kota : 2.092.757.000		100%	2.092.757.000	
1	05	10501	16	01	Kegiatan Penertiban dan Evaluasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Prosentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan yang tertangani)	Satpol PP	96%	1.302.757.000	APBD Kota : 1.302.757.000		96%	1.302.757.000	
1	05	10501	16	02	Kegiatan Peningkatan SDA dan Kerjasama Satpol PP dan Damkar	Prosentase Aparatur Satpol PP dan Damkar yang mengikuti kegiatan	Satpol PP	80%	550.000.000	APBD Kota : 550.000.000		82%	550.000.000	
1	05	10501	16	03	Kegiatan Pengamanan Kegiatan Pemerintah	Prosentase kegiatan pengamanan	Satpol PP	100%	240.000.000	APBD Kota : 240.000.000		100%	250.000.000	
1	05	10501	17		ProgramPengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Satpol PP	100%	335.000.000	APBD Kota : 335.000.000		100%	335.000.000	

1					2	3	4	4	6	7	8	9	10	11
1	05	10501	17	01	Kegiatan Pembinaan Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Prosentase Peserta yang paham terhadap Perda dan Perwal	Satpol PP	100%	210.000.000	APBD Kota : 210.000.000		100%	220.000.000	
1	05	10501	17	02	Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Prosentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perwal	Satpol PP	100%	125.000.000	APBD Kota : 125.000.000		100%	130.000.000	
1	05	10501	18		Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu tanggap (response time rate)	Satpol PP	100%	1.180.670.000	APBD Kota : 1.180.670.000		100%	1.180.670.000	
1	05	10501	18	01	Kegiatan Pencegahan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran	Prosentase anggota Damkar yang bersertifikat	Satpol PP	80%	904.200.000	APBD Kota : 904.200.000		80%	904.200.000	
1	05	10501	18	02	Kegiatan Operasi dan evaluasi penanggulangan pemadam kebakaran	Prosentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perwal	Satpol PP	100%	276.470.000	APBD Kota : 276.470.000		100%	276.470.000	
1	05	10501	19		Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Rasio petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota	Satpol PP	1.3 orang setiap RT	665.020.000	APBD Kota : 665.020.000		1.3 orang setiap RT	665.020.000	
1	05	10501	19	01	Kegiatan Pemberdayaan dan Evaluasi Masyarakat Dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Satpol PP	90%	515.020.000	APBD Kota : 515.020.000		92%	515.020.000	

1					2	3	4	4	6	7	8	9	10	11
1	05	10501	19	02	Kegiatan Pengerahan dan Pengendalian Satuan Linmas	Prosentase Personil Satlinmas yang mengikuti kegiatan	Satpol PP	75%	150.000.000	APBD Kota : 150.000.000		76%	150.000.000	
J U M L A H									**8.512.309.000**					

Madiun, 10 Mei 2019

KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MADIUN

SUNARDI NURCAHYONO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770518 199511 1 001

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
0					**RUTIN**								
0	**0**								**4,138,862,000**				
0	**0**	**10501**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Prosentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran**		100%	**2,806,012,000**	APBD Kota : 2.806.012.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0		100%	**2,806,012,000**
				1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Barang Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	7 Jenis	2,556,012,000	APBD Kota : 2.556.012.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0	-	7 Jenis	2,811,615,000
				2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Satpol PP	30 kali perjalanan	250,000,000	APBD Kota : 250.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0	-	30 kali perjalanan	250,000,000
0	**0**	**10501**	**2**		**Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Prosentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik**		100%	**550,000,000**	APBD Kota : 550.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0		100%	**555,000,000**
				1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Gedung Yang Dipelihara	Satpol PP dan Garasi Damkar	2 Gedung	25,000,000	APBD Kota : 25.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0	-	1 Gedung	30,000,000
				2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	Satpol PP	33 Unit	500,000,000	APBD Kota : 500.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0	-	33 Unit	500,000,000
				3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jenis Sarana dan Prasarana Kantor	Satpol PP	6 Jenis	25,000,000	APBD Kota : 25.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0	-	6 Jenis	25,000,000
0	**0**	**10501**	**3**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**		100%	**683,000,000**	APBD Kota : 2.083.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0		100%	**300,000,000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang dibeli	Satpol PP	5 jenis	196,000,000	APBD Kota : 196.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0	-	-	-
				2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Satpol PP	100 orang	300,000,000	APBD Kota : 400.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0	-	114 orang	300,000,000
				3	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan (Rehab Gudang Satpol PP)	Gudang Kantor yang direhab	Satpol PP	1 gedung	187,000,000	APBD Kota : 187.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0	-	-	-
0	**0**	**10501**	**5**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Prosentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu**		100%	**99,850,000**	APBD Kota : 99.850.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0		100%	**99,850,000**
				1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Dokumen Perencanaan/Pelaporan	Satpol PP	10 Dokumen	99,850,000	APBD Kota : 99.850.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0	-	5 Dokumen	99,850,000
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR**								
1	**5**				**Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.**				**4,373,447,000**				
1	**5**	**10501**	**16**		**Program Pembinaan, Penertiban dan Evaluasi dalam Penyelengaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat**	**Cakupan Patroli petugas Satpol PP perhari**		6 kali	**1,992,757,000**	APBD Kota : 2.092.757.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0		6 kali	**1,992,757,000**
				1	Kegiatan Peningkatan SDA dan Kerjasama Satpol PP dan Damkar	Prosentase Aparatur Satpol PP dan Damkar yang mengikuti Kegiatan	Satpol PP	80%	450,000,000	APBD Kota : 550.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0	-	80%	450,000,000
				2	Kegiatan Penertiban dan Evaluasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Prosentase Pelanggaran K3 yang Terselesaikan	Satpol PP	92%	1,302,757,000	APBD Kota : 1.302.757.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0	-	94%	1,302,757,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3	Kegiatan Pengamanan Kegiatan Pemerintah	Prosentase Kegiatan Pengamanan	Satpol PP	100%	240,000,000	APBD Kota : 240.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0	-	100%	250,000,000
1	**5**	**10501**	**17**		**Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota**	**Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota**		100%	**335,000,000**	APBD Kota : 335.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0		100%	**335,000,000**
				1	Kegiatan Pembinaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Prosentase peserta yang paham terhadap Pelanggar Perda dan Perwal	Satpol PP	100%	210,000,000	APBD Kota : 210.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0		100%	220,000,000
				2	Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Prosentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perwal	Satpol PP	100%	125,000,000	APBD Kota : 125.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0	-	100%	130,000,000
1	**5**	**10501**	**18**		**Program peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran**	**Tingkat Waktu tanggap (response time rate)**	100%	100%	**1,180,670,000**	APBD Kota : 1.180.670.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0		100%	**1,180,670,000**
				1	Kegiatan Pencegahan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran	Prosentase Anggota Damkar yang bersertifikat	Satpol PP	80%	904,200,000	APBD Kota : 904.200.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0	-	80%	904,200,000
				2	Kegiatan Operasi dan evaluasi Penanggulangan Pemadam Kebakaran	Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran	Kota Madiun	100%	276,470,000	APBD Kota : 276.470.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0	-	100%	276,470,000
1	**5**	**10501**	**19**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota**		1.3 orang setiap RT	**865,020,000**	APBD Kota : 665.020.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0		1.3 orang setiap RT	**865,020,000**
				1	Kegiatan Pemberdayaan dan Evaluasi Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Satpol PP	90%	715,020,000	APBD Kota : 515.020.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0	-	92%	715,020,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Kegiatan Pengerahan dan Pengendalian Satuan Linmas	Prosentase Personil Satlinmas yang mengikuti kegiatan	Satpol PP	75%	150,000,000	APBD Kota : 150.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0		76%	150,000,000
JUMLAH					**8,512,309,000**				

Total Jumlah Dana Renja yang masuk : **Rp. 8.512.309.000,-**

Madiun, 25 Juni 2019

KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MADIUN

SUNARDI NURCAHYONO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I

BAB IV
PENUTUP

Dengan adanya rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun yang menjadi prioritas program sebagai penjabaran visi dan misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan di tahun 2019. Selanjutnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafond anggaran sementara (PPAS) dan APBD. Oleh karena itu kerjasama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal.

Pelaksanaan rencana kerja tersebut selanjutnya akan dievaluasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan OPD yang bersangkutan sebagai bahan Laporan Ketertangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Gubernur Jawa Timur.

Dokumen perencanaan Rencana Kerja ini merupakan acuan untuk melaksanakan program kegiatan sesuai urusan wajib dan rencana kedepan akan lebih meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan berbagai inovasi dan kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja yang berkompeten. Sehingga tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang lebih kondusif dan dinamis.